

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Partai Golongan Karya (Golkar)

Golongan Karya atau Partai Golkar berawal dari pertemuan gagasan yang dikembangkan oleh Soekarno, Soepomo, dan Ki Hadjar Dewantara, sekitar tahun 1940 telah mengemukakan pemikiran integralistik-kolektivistis. Gagasan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk Golongan Fungsional, yang pada perkembangannya mengalami perubahan nama menjadi Golongan Karya pada tahun 1959, dengan mengambil istilah dari bahasa Sanskerta. Seiring waktu, nama ini lebih dikenal secara luas dalam dunia politik nasional sebagai Golkar.

Pada 1950-an, pembentukan Partai Golkar pada awalnya diarahkan sebagai wadah untuk berbagai golongan yang ada di tengah masyarakat. Gagasan ini muncul dari keinginan untuk menghadirkan bentuk keterwakilan kolektif yang dianggap lebih sesuai dengan corak 'demokrasi' khas Indonesia. Pemikiran tersebut sejalan dengan pandangan Soekarno, Soepomo, dan Ki Hadjar Dewantara, yang menekankan pentingnya kebersamaan dan kesatuan dalam sistem politik nasional.

Pada awal kemunculannya, Partai Golkar belum berbentuk sebagai partai politik, melainkan hadir sebagai wadah perwakilan, melalui konsep Golongan Karya. Ide dasarnya lebih diarahkan sebagai sistem perwakilan alternatif yang menjadi dasar bagi lembaga-lembaga, terutama di tengah

dinamika politik saat itu. Sekitar tahun 1957, organisasi ini mulai terbentuk ketika sistem partai sedang berkembang di Indonesia, dan Golkar muncul sebagai alternatif yang menyatukan berbagai kelompok keahlian dalam satu wadah organisasi.

Partai Golkar pada awalnya juga diarahkan untuk membangun dan menghimpun berbagai organisasi masyarakat (ormas) sebagai basis kekuatan sosial. Namun dalam perkembangannya, Golkar kemudian bertransformasi menjadi sebuah partai politik. Perubahan ini tidak lepas dari peran Soekarno sebagai konseptor serta Abdul Haris Nasution sebagai penggerak, bersama dukungan Angkatan Darat, yang mendorong Golkar menjadi kekuatan politik formal, terutama dalam konteks persaingan ideologis saat itu, termasuk untuk menghadapi pengaruh Partai Komunis Indonesia.

Perkembangan tersebut pada akhirnya justru bertentangan dengan konsep awal Partai Golkar yang semula menolak bentuk partai politik dan juga berbeda dengan pandangan Partai Komunis Indonesia yang menekankan adanya perbedaan kelas. Golkar sejak awal lebih menonjolkan gagasan persatuan dan kerja sama antargolongan. Namun dalam dinamika politik yang terus berubah, sikap anti-partai itu perlahan bergeser hingga akhirnya Golkar sendiri bertransformasi menjadi sebuah partai politik. Ironisnya, gagasan awal yang sempat diarahkan untuk mereduksi peran partai-partai justru berbalik, menjadikan Golkar partai utama yang mampu bertahan dan terus eksis di arena politik Indonesia hingga kini.

Partai Golkar yang sebelumnya dikenal sebagai Golongan Karya dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), merupakan partai besar di Indonesia yang memiliki akar sejarah sejak masa akhir pemerintahan Soekarno. Awal mula kemunculannya ditandai dengan pembentukan Sekber Golkar pada tahun 1964, yang ketika itu didorong oleh Angkatan Darat sebagai upaya untuk melawan dominasi Partai Komunis Indonesia di panggung politik nasional.

Partai Golkar merupakan kekuatan politik sejak masa Orde Lama dan kemudian berperan besar pada era Orde Baru. Dalam Pemilu 3 Juli 1971, Golkar meraih sekitar 62,8% suara dan memperoleh 236 kursi DPR, ditambah 100 kursi dari pengangkatan pemerintah. Perolehan ini jauh melampaui partai lain seperti Nahdatul Ulama, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Muslimin Indonesia, sehingga menunjukkan dominasi kuat Golkar pada masa itu.

Partai Golkar, merupakan salah satu partai politik di Indonesia. Partai ini secara historis berkaitan dengan pembentukan Sekber Golkar pada 20 Oktober 1964, yang melibatkan peran tokoh seperti Soeharto dan Suhardiman dalam proses awal pembentukannya.

2. Visi

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia.

3. Misi

- a. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD NRI 1945.
- b. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD NRI 1945.
- c. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam wadah Negara Republik Indonesia.
- d. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum, dan HAM.

4. Tujuan Partai Golkar


- a. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menghormati dan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan hukum dan hak asasi manusia.¹

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024, perolehan suara Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin mencapai 53.973 suara, sebagai berikut:

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
NOMOR 270 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024



PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN					JUMLAH AKHIR
	1	2	3	4	5	
	DAPIL KOTA BANJARMASIN 1	DAPIL KOTA BANJARMASIN 2	DAPIL KOTA BANJARMASIN 3	DAPIL KOTA BANJARMASIN 4	DAPIL KOTA BANJARMASIN 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Partai Nasional						
1. Partai Kebangkitan Bangsa	3.672	8.212	6.027	10.368	7.565	35.844

Sumber :

https://jdih.kpu.go.id/datakabko/banjarmasin/data_kepkpud/2024kpt270.pdf

Gambar 4. 1 Dokumen Perolehan Suara Sah Partai Politik pada Pemilu 2024 di Kota Banjarmasin

¹ Sejarah Partai Golkar – Partai Golongan Karya, t.t., diakses 28 Februari 2026, <https://www.partaigolkar.com/profil/>.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung terhadap pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya bidang pendidikan politik dan kaderisasi, serta beberapa kader dan masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan pendidikan politik, dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan 1

1) Identitas Informan

Nama : Dewi Damayanti Said, S.E., M.M

Pekerjaan / Jabatan : Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan DPD Partai Golkar Kalsel

Alamat : Jl. Ahmad Yani Km 5

2) Uraian Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa Ibu Dewi Damayanti Said, S.E., M.M., menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Partai Golkar sejak masa kepemimpinan H. Sahbirin Noor (Paman Birin) dan pada menjelang Pemilu 2024. Jabatan tersebut mencerminkan kepercayaan partai terhadap kapasitasnya dalam mengelola program pendidikan politik serta memperkuat wawasan kebangsaan bagi kader dan masyarakat. Dalam struktur kepengurusan Partai Golkar, organisasi dipimpin oleh

seorang ketua yang bertanggung jawab atas arah kebijakan partai, didampingi oleh sekretaris dan bendahara, serta beberapa wakil ketua yang membawahi bidang-bidang strategis, seperti bidang Pemenangan Pemilu, Hukum, Pendidikan dan Kebudayaan, serta Ekonomi. Setiap wakil ketua bidang didukung oleh wakil sekretaris, biro, dan anggota biro yang berperan dalam menunjang pelaksanaan program kerja agar berjalan secara terarah dan efektif. Dengan posisi tersebut, Ibu Dewi memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan kegiatan pendidikan politik sebagai bagian dari upaya partai untuk meningkatkan pemahaman serta partisipasi politik masyarakat.

Sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, tugas utama beliau adalah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan politik, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Secara internal, pendidikan politik dilaksanakan melalui proses kaderisasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman anggota Partai Golkar terhadap ideologi partai, sistem politik, serta peran dan tanggung jawab kader dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan ini juga diarahkan untuk membentuk kader yang kompeten dan siap menghadapi dinamika politik. Sementara itu, secara eksternal, pendidikan politik ditujukan kepada masyarakat luas, termasuk mahasiswa dan pelajar sebagai kelompok pemilih pemula, guna memberikan pemahaman mengenai pentingnya partisipasi politik, kesadaran berdemokrasi, serta kemampuan dalam menyikapi isu-isu politik secara kritis dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat memperoleh pengetahuan politik yang dapat mendorong keterlibatan mereka dalam proses demokrasi.

Bentuk pendidikan politik yang telah dilaksanakan oleh Ibu Dewi Damayanti Said diwujudkan melalui berbagai kegiatan edukatif yang bersifat langsung dan partisipatif. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi peraturan daerah, sosialisasi wawasan kebangsaan, seminar dan diskusi publik di sekolah serta perguruan tinggi, hingga forum tatap muka dengan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Pendidikan politik juga dilakukan melalui kegiatan kaderisasi internal Partai Golkar yang berfokus pada penguatan ideologi partai, pemahaman sistem politik, serta peningkatan kapasitas kader. Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk penyampaian materi, dialog interaktif, dan sesi tanya jawab, sehingga peserta tidak hanya menerima informasi secara satu arah, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran politik. Melalui berbagai bentuk kegiatan tersebut, pendidikan politik diharapkan mampu meningkatkan literasi politik masyarakat sekaligus mendorong partisipasi politik yang lebih sadar dan bertanggung jawab.

Terkait keterlibatannya dalam pendidikan politik, berdasarkan hasil wawancara, Ibu Dewi menjelaskan bahwa selama menjabat sebagai anggota DPRD, beliau secara rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi peraturan daerah yang diselenggarakan dua kali dalam sebulan serta sosialisasi wawasan kebangsaan dengan frekuensi yang sama. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan daerah, nilai-nilai kebangsaan, serta pentingnya peran warga negara dalam kehidupan demokrasi. Menurut Ibu Dewi, kegiatan tersebut tidak hanya merupakan

bentuk pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga menjadi sarana pendidikan politik guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta mendorong partisipasi politik yang lebih aktif dan bertanggung jawab.

Adapun sasaran utama kegiatan pendidikan politik tersebut adalah siswa SMA dan mahasiswa yang dipandang sebagai pemilih pemula dalam Pemilu. Kelompok ini dianggap memiliki peran penting dalam menentukan arah demokrasi karena berada pada tahap awal keterlibatan politik. Oleh karena itu, materi yang disampaikan tidak hanya mencakup wawasan kebangsaan, tetapi juga pemahaman mengenai arah dan masa depan bangsa, pentingnya menjaga persatuan, serta pengetahuan terkait kebijakan politik dan persiapan menghadapi pemilu. Melalui penyampaian materi tersebut, para peserta diharapkan mampu memahami pentingnya menggunakan hak pilih secara bijak serta memiliki kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Selain melalui kegiatan sosialisasi, Ibu Dewi juga kerap diundang sebagai narasumber dalam seminar yang diselenggarakan di berbagai perguruan tinggi. Keterlibatannya sebagai pemateri menunjukkan adanya peran aktif dalam menyebarkan pemahaman politik kepada kalangan akademisi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut sering melibatkan pemateri lain yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya, seperti dosen, guru, pihak kepolisian, maupun perwakilan instansi pemerintah, sehingga materi yang diberikan dapat disampaikan secara komprehensif. Sebagai contoh, dalam sosialisasi peraturan daerah terkait pemberdayaan perempuan, turut dihadirkan tokoh perempuan dari dinas terkait

untuk memberikan perspektif yang lebih mendalam. Kolaborasi ini mendukung efektivitas penyampaian materi sekaligus memperkuat kualitas pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat.

Beliau juga menegaskan bahwa dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, identitasnya sebagai anggota Fraksi Partai Golkar selalu diperkenalkan secara terbuka kepada para peserta. Pengenalan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai keterlibatan partai dalam kegiatan pendidikan politik. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui bahwa Partai Golkar tidak hanya berperan dalam ranah politik formal, tetapi juga aktif turun langsung ke lapangan untuk berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman politik masyarakat. Selain itu, keterbukaan ini diharapkan dapat membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat citra partai sebagai organisasi yang hadir dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pengamatannya, respons peserta terhadap kegiatan tersebut tergolong sangat positif. Para siswa dan guru menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung, sementara kelompok masyarakat seperti organisasi ibu-ibu dan Karang Taruna juga menyambut baik pelaksanaan sosialisasi. Tingginya partisipasi peserta dalam mengikuti kegiatan dinilai mencerminkan adanya ketertarikan serta peningkatan pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Antusiasme tersebut terlihat dari keaktifan peserta dalam mengikuti rangkaian kegiatan serta keterlibatan mereka dalam sesi diskusi.

Terkait efektivitas pendidikan politik, Ibu Dewi menilai bahwa kegiatan tersebut berjalan efektif, khususnya menjelang Pemilu 2024. Menurutnya, periode

satu tahun sebelum pemilu merupakan momentum yang paling optimal karena kader dan anggota partai cenderung lebih aktif turun ke masyarakat untuk memberikan edukasi politik. Kondisi ini dinilai mampu memperluas jangkauan informasi politik sekaligus mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu hambatan utama adalah masih kuatnya stigma negatif masyarakat terhadap politik dan politisi, yang kerap dikaitkan dengan praktik kekuasaan, ketidakjujuran, serta tindak korupsi. Persepsi tersebut umumnya dipengaruhi oleh pemberitaan di media massa maupun informasi yang beredar di media sosial, sehingga membentuk pandangan skeptis di kalangan masyarakat terhadap aktivitas politik. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pendidikan politik karena dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

Oleh karena itu, Partai Golkar berupaya meluruskan pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa tidak semua aktivitas politik bersifat negatif, melainkan bertujuan untuk membangun bangsa dan negara serta menciptakan kepemimpinan yang berkualitas. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan edukatif dalam berbagai kegiatan sosialisasi, dengan memberikan pemahaman bahwa politik juga merupakan sarana pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat melihat politik secara lebih objektif dan tidak hanya terpengaruh oleh citra negatif yang berkembang.

Lebih lanjut, Ibu Dewi menekankan bahwa pendidikan politik sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, politik yang dijalankan dengan baik akan melahirkan pemimpin dan anggota legislatif yang berkualitas. Oleh sebab itu, pendidikan politik perlu ditanamkan sejak dini, baik melalui lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat, agar generasi muda mampu menyaring informasi, khususnya di era digital yang rentan terhadap penyebaran hoaks.

Ia juga berpesan agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial dengan membagikan informasi yang positif serta mendukung terciptanya iklim politik yang sehat. Pada dasarnya, seluruh partai politik memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan bangsa, sehingga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana masyarakat mampu memilah informasi secara kritis.²

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama	: Puar Junaidi
Pekerjaan / Jabatan	: Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kalsel
Alamat	: -

2) Uraian Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan, Bapak Puar Junaidi selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar menjelaskan

² Dewi Damayanti Said, "Wawancara Pribadi", di kediaman beliau, Kota Banjarmasin, 25 Desember 2025

bahwa pendidikan politik merupakan upaya penyampaian pengetahuan kepada kader agar mereka memahami rambu-rambu organisasi, kewenangan, serta hak dan kewajiban sebagai bagian dari partai politik. Selain ditujukan kepada kader, pendidikan politik juga diberikan kepada masyarakat melalui perpanjangan tangan partai, salah satunya fraksi di lembaga legislatif. Fraksi memiliki tugas dan fungsi untuk menyerap serta memperjuangkan aspirasi masyarakat, sehingga aktivitas tersebut tidak hanya menjadi bentuk representasi politik, tetapi juga berkontribusi dalam membangun citra positif partai di tengah masyarakat. Menurutnya, pembekalan kader dan penyerapan aspirasi masyarakat merupakan bagian integral dari pendidikan politik karena keduanya berperan dalam meningkatkan pemahaman politik sekaligus memperkuat hubungan antara partai dan publik.

Lebih lanjut, Pak Puar menegaskan bahwa pendidikan politik kepada masyarakat harus disampaikan secara terbuka dan berorientasi pada hal-hal yang konstruktif. Transparansi dinilai penting mengingat masih terdapat partai politik yang belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan pendidikan politik melalui dana pembinaan yang dialokasikan berdasarkan perolehan suara partai politik. Dana tersebut digunakan untuk membina kader sekaligus memberikan edukasi politik kepada masyarakat sebagai bagian dari amanat peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, pendidikan politik diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti pertemuan dengan masyarakat, seminar bagi mahasiswa, serta sosialisasi ketentuan dan regulasi terbaru. Kegiatan-kegiatan tersebut

merupakan bentuk tanggung jawab partai politik dalam meningkatkan literasi politik masyarakat.

Selain menyasar kader, pendidikan politik juga diberikan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan yang melibatkan langsung unsur partai, khususnya fraksi di lembaga legislatif. Menurut Pak Puar, fraksi menjadi perpanjangan tangan partai dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat melalui kegiatan penyerapan aspirasi, kunjungan kerja ke daerah pemilihan, dialog publik, serta forum reses anggota legislatif. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga mendapatkan pemahaman mengenai proses pengambilan kebijakan, peran partai politik, serta fungsi wakil rakyat di lembaga legislatif.

Lebih lanjut, Pak Puar menegaskan bahwa pendidikan politik kepada masyarakat juga diwujudkan melalui kegiatan yang bersifat edukatif dan terbuka, seperti seminar dan diskusi publik yang melibatkan mahasiswa, pemuda, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan regulasi terbaru juga menjadi bagian dari pendidikan politik, agar masyarakat memahami hak, kewajiban, serta mekanisme partisipasi dalam sistem demokrasi. Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan ini dinilai penting agar masyarakat dapat melihat secara langsung peran dan kontribusi partai politik.

Pak Puar mengaku terlibat langsung dalam pelaksanaan pendidikan politik dan menyatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan. Adapun strategi yang digunakan Partai Golkar dalam memberikan pendidikan politik

kepada masyarakat adalah dengan menyampaikan tugas dan fungsi partai politik secara jelas, termasuk peran anggota fraksi dalam menjalankan kewajiban serta merealisasikan program-program yang dibutuhkan masyarakat. Ia menambahkan bahwa partai tidak selalu dapat merealisasikan program secara langsung, sehingga diperlukan peran perwakilan di legislatif maupun eksekutif sebagai penghubung untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat diharapkan memahami bahwa partai politik memiliki tujuan untuk memperjuangkan kepentingan publik melalui jalur kekuasaan yang sah dalam sistem demokrasi.

Terkait tantangan, Pak Puar menilai bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan pendidikan politik terletak pada beban moral partai untuk merealisasikan setiap hal yang telah disampaikan kepada masyarakat. Apabila janji atau program tidak dapat diwujudkan, maka kepercayaan publik terhadap partai dapat menurun. Ia mengakui bahwa masih terdapat pandangan sebagian masyarakat yang menilai partai politik hanya memberikan janji tanpa realisasi. Oleh karena itu, konsistensi antara pernyataan dan tindakan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Meskipun partai memiliki keterbatasan kewenangan dan sering kali hanya dapat berperan melalui pengabdian sosial atau pengusulan program, keberadaan kader di posisi strategis seperti legislatif dan eksekutif memungkinkan aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan secara lebih konkret.

Dalam mengukur tingkat keberhasilan pendidikan politik, Pak Puar menyebut bahwa indikatornya bersifat relatif, namun salah satu tolok ukur yang

dapat digunakan adalah perolehan suara partai dalam pemilu. Menurutnya, capaian suara Partai Golkar pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa pendidikan politik yang telah dilaksanakan berjalan sesuai dengan tujuan partai, khususnya dalam meningkatkan dukungan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pendidikan politik berpotensi memberikan dampak terhadap partisipasi politik, baik dalam bentuk peningkatan pemahaman maupun keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.

Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan politik merupakan amanat undang-undang yang didukung oleh alokasi dana pemerintah. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, sekitar 51% dana bantuan partai politik diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan politik, sedangkan 49% dialokasikan untuk operasional kesekretariatan. Namun, apabila kebutuhan kesekretariatan tidak terlalu besar, sebagian anggaran dapat kembali dialihkan untuk memperkuat program pendidikan politik. Dengan besaran dana yang relatif signifikan khususnya di tingkat provinsi Partai Golkar dituntut untuk melaksanakan kegiatan secara terencana, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, pendidikan politik menjadi agenda rutin yang diselenggarakan setiap tahun sesuai dengan penganggaran dalam APBD.

Sebagai penutup, Pak Puar menegaskan bahwa pendidikan politik telah berjalan sebagaimana mestinya dan menjadi program berkelanjutan di Partai Golkar. Dukungan anggaran dari pemerintah memungkinkan partai untuk terus melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pemahaman politik masyarakat serta pembinaan kader. Dengan frekuensi kegiatan yang cukup tinggi,

ia menilai bahwa pendidikan politik tidak hanya menjadi kewajiban normatif partai, tetapi juga merupakan strategi penting dalam mendorong partisipasi politik masyarakat serta memperkuat posisi partai dalam kontestasi demokrasi.³

c. Informan 3

1) Identitas Informan

Nama : Amran
 Pekerjaan / Jabatan : Wakil Sekretaris Bidang Media dan
 Penggalangan Opini DPD Partai
 Golkar Kalsel
 Alamat : -

2) Uraian Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan, Bapak Amran selaku Wakil Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar menyampaikan bahwa beliau telah menjabat dalam bidang tersebut sejak tahun 2004. Pengalaman yang cukup panjang ini menunjukkan keterlibatannya secara konsisten dalam mengelola komunikasi politik partai, khususnya dalam membangun citra serta menyampaikan berbagai program kepada masyarakat. Dalam struktur bidang media dan penggalangan opini, terdapat wakil ketua bidang, wakil sekretaris, biro, serta anggota yang bekerja secara terkoordinasi dalam mendukung publikasi kegiatan partai.

Menurut Bapak Amran, pendidikan politik merupakan upaya yang dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peran

³ Puar Junaedi, "Wawancara Pribadi", di Kantor DPD Partai Golkar Kalsel, 3 Februari 2026

dan tujuan kehadiran Partai Golkar di tengah kehidupan sosial. Partai Golkar dipandang tidak hanya sebagai organisasi politik semata, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan literasi politik masyarakat. Melalui pendidikan politik, masyarakat diharapkan dapat memahami makna berpolitik, pentingnya komunikasi antara partai dan masyarakat, serta peran calon anggota legislatif sebagai wakil rakyat yang bertugas memperjuangkan aspirasi di lembaga DPR. Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih selektif dalam menentukan pilihan pemimpin yang mampu merepresentasikan kepentingan mereka.

Lebih lanjut, pendidikan politik juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial, seperti pemberian bantuan kepada korban banjir, penyaluran sembako, serta keterlibatan aktif partai dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan saat terjadi bencana, tetapi juga menjadi bagian dari program berkelanjutan partai. Selain itu, melalui anggota fraksi, Partai Golkar melaksanakan kegiatan reses yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Aspirasi yang diperoleh kemudian diperjuangkan oleh anggota DPR dari Partai Golkar sebagai bentuk representasi kepentingan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Media dan Penggalangan Opini memiliki tanggung jawab untuk meliput, mendokumentasikan, serta mempublikasikan seluruh kegiatan Partai Golkar melalui berbagai saluran media, baik cetak, elektronik, maupun media sosial. Publikasi tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui program dan aktivitas partai, termasuk kegiatan pendidikan politik yang telah dilaksanakan. Melalui penyebaran informasi tersebut, partai ingin menunjukkan bahwa kehadirannya tidak hanya terbatas pada momentum pemilu

atau pemilihan kepala daerah, tetapi juga diwujudkan melalui kegiatan politik yang berkelanjutan.

Terkait dampak kegiatan yang dipublikasikan melalui media, Bapak Amran menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pemantauan terhadap respons masyarakat, salah satunya melalui komentar di media sosial. Meskipun terdapat beberapa tanggapan negatif yang tidak dapat dihindari, banyak pula komentar positif yang menunjukkan bahwa masyarakat memahami serta mengapresiasi program yang dijalankan partai. Respons positif tersebut dinilai sebagai indikator bahwa kegiatan Partai Golkar telah memberikan dampak dan mampu menjangkau masyarakat secara luas.

Ia juga menambahkan bahwa pembentukan opini publik sangat dipengaruhi oleh cara media menyajikan informasi. Oleh karena itu, narasi yang disampaikan kepada masyarakat diupayakan menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami agar pesan yang ingin disampaikan tidak menimbulkan penafsiran yang beragam. Dengan strategi komunikasi tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memahami tujuan kegiatan partai serta melihat secara langsung kontribusi Partai Golkar dalam memberikan pendidikan politik.⁴

d. Informan 4

1) Identitas Informan

Nama : Ari Bimo GP, S.H

⁴ Amran, "Wawancara Pribadi", di Kantor DPD Partai Golkar Kalsel, 3 Februari 2026

Pekerjaan / Jabatan : Wakil Sekretaris Bidang Pemuda
dan Olahraga DPD Partai Golkar
Kalsel

Alamat : -

2) Uraian Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan, Bapak Ari Bimo GP, S.H., menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan bagian penting dari strategi Partai Golkar, khususnya dalam menghadapi momentum politik seperti pemilihan kepala daerah maupun pemilu. Menurutnya, pendidikan politik diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang bersinggungan langsung dengan aktivitas partai, salah satunya melalui konsolidasi organisasi dengan turun langsung ke lapangan. Sebagai partai yang memiliki struktur organisasi yang kuat, Partai Golkar secara rutin melaksanakan konsolidasi untuk memberikan pemahaman kepada pengurus dan kader mengenai visi, misi, serta tujuan partai. Kegiatan ini dinilai penting karena tidak semua pengurus di tingkat daerah maupun kecamatan memiliki pemahaman yang sama terkait arah perjuangan partai, sehingga diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan pendidikan politik, Partai Golkar juga melibatkan organisasi sayap partai, seperti Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). AMPG berperan sebagai wadah kaderisasi yang menggalang partisipasi generasi muda dan pemilih pemula, sedangkan KPPG berfokus pada pemberdayaan perempuan serta penguatan peran perempuan dalam kehidupan politik. Keterlibatan generasi muda menjadi perhatian

penting karena jumlah pemilih pemula terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, partai mendorong hadirnya kader-kader muda yang inovatif dan kreatif agar mampu menjadi daya tarik bagi kalangan pemilih baru sekaligus memperkuat keberlanjutan organisasi.

Lebih lanjut, pendidikan politik juga diwujudkan melalui program dan kegiatan yang bersifat edukatif, dengan tujuan memperkenalkan nilai-nilai partai serta mendorong keterlibatan politik sejak dini. Materi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan fungsi dan peran partai politik, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara serta pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan. Dengan demikian, kader diharapkan memiliki kesiapan dalam menghadapi proses demokrasi sekaligus mampu berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Terkait pelaksanaannya, Bapak Ari Bimo menilai bahwa pendidikan politik dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh sistem organisasi Partai Golkar yang terstruktur. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program tetap bergantung pada bagaimana kegiatan tersebut dijalankan secara optimal, terutama dalam menghadirkan pendekatan yang relevan agar mampu menarik minat generasi muda. Secara keseluruhan, pendidikan politik yang dilaksanakan Partai Golkar menjadi langkah strategis dalam memperkuat pemahaman kader sekaligus mendorong meningkatnya partisipasi politik masyarakat.⁵

e. Informan 5

⁵ Ari Bimo GP, "Wawancara Pribadi", di Kantor DPD Partai Golkar Kalsel, 2 Februari 2026

1) Identitas Informan

Nama : Gusti Rina
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Sultan Adam

2) Uraian Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan, Ibu Rina menjelaskan bahwa dirinya pernah mengikuti kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Partai Golkar yang secara khusus menyasar kaum perempuan dengan tema “Peningkatan Kapasitas Perempuan Politik untuk Menyongsong Pemilu Serentak Tahun 2024.” Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pembekalan kepada para calon perempuan yang akan turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Menurutnya, pembekalan ini sangat penting agar peserta memiliki kesiapan dalam berkomunikasi dengan masyarakat, khususnya pemilih perempuan, serta mampu menghindari kesalahan komunikasi saat berada di lapangan. Dengan adanya persiapan yang matang, kader perempuan diharapkan dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai penghubung antara partai dan masyarakat.

Ia menambahkan bahwa pendidikan politik bagi perempuan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam berinteraksi dengan sesama perempuan, tetapi juga agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemilih pemula. Perempuan dinilai memiliki kedekatan emosional yang kuat dalam lingkungan keluarga maupun sosial, sehingga berpotensi menjadi penggerak partisipasi politik. Melalui kegiatan tersebut, peserta didorong untuk

lebih aktif mengajak keluarga, kerabat, serta masyarakat sekitar agar berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai agen sosialisasi politik yang dapat membantu meningkatkan kesadaran demokrasi di masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, materi pendidikan politik juga mengarahkan peserta untuk melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat melalui metode *door-to-door*, kunjungan, serta pertemuan dengan warga. Strategi ini dinilai efektif karena memungkinkan kader perempuan membangun kedekatan emosional dengan masyarakat sekaligus memahami kebutuhan dan aspirasi mereka secara langsung. Selain memperkuat hubungan sosial, pendekatan tersebut juga membantu kader dalam menyampaikan program partai dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, komunikasi politik yang terjalin tidak bersifat satu arah, melainkan menghadirkan ruang dialog antara masyarakat dan partai politik.

Ibu Rina menilai bahwa kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan Partai Golkar memiliki sejumlah kelebihan, terutama karena peserta dibekali melalui seminar dan pelatihan seperti *training of trainers* (ToT). Pembekalan ini membuat kader perempuan menjadi lebih percaya diri, komunikatif, serta mampu menyampaikan pesan politik secara lebih terstruktur dan sistematis. Ia bahkan berpendapat bahwa pelatihan tersebut memberikan nilai tambah dibandingkan dengan pembekalan yang diterima oleh kader dari beberapa partai lain, khususnya dalam hal kemampuan komunikasi politik di tengah masyarakat. Peningkatan

kapasitas ini menjadi modal penting bagi perempuan untuk terlibat secara lebih aktif dalam proses politik.

Jika ditinjau dari pengalaman yang disampaikan, kegiatan pendidikan politik ini dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan pemahaman serta kesiapan perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik. Efektivitas tersebut terlihat dari adanya dorongan kepada peserta untuk terlibat langsung dalam kegiatan sosialisasi, mengajak masyarakat menggunakan hak pilih, serta berkontribusi dalam upaya memenangkan partai secara demokratis. Selain itu, meningkatnya rasa percaya diri dan kemampuan komunikasi peserta menunjukkan bahwa pendidikan politik berperan dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik, khususnya dari kalangan perempuan.

Lebih jauh, kegiatan ini juga mencerminkan adanya upaya Partai Golkar dalam memperkuat representasi perempuan di ranah politik. Dengan memberikan ruang pembelajaran dan pelatihan, perempuan tidak hanya diposisikan sebagai pelengkap, tetapi sebagai aktor penting yang mampu berkontribusi terhadap proses demokrasi. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa pendidikan politik dapat menjadi sarana pemberdayaan perempuan agar lebih siap menghadapi dinamika politik, terutama menjelang pemilu.

Sebagai saran ke depan, Ibu Rina berharap pendidikan politik yang diselenggarakan Partai Golkar tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan kader dalam berkomunikasi, tetapi juga lebih menekankan pada upaya membangun kesadaran politik masyarakat secara luas. Menurutnya, masyarakat perlu didorong untuk memilih pemimpin secara cerdas berdasarkan kualitas, rekam jejak, serta

kontribusinya terhadap pembangunan, bukan semata-mata karena praktik politik uang. Ia juga menekankan pentingnya menghadirkan pemimpin perempuan yang mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga kehadiran perempuan dalam politik tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar membawa perubahan positif.

Secara keseluruhan, pengalaman Ibu Rina menunjukkan bahwa pendidikan politik yang berfokus pada perempuan memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Melalui pembekalan yang terarah, perempuan dapat menjadi motor penggerak dalam menyebarkan pemahaman politik sekaligus mendorong terciptanya proses demokrasi yang lebih partisipatif dan berkualitas.⁶

f. Informan 6

1) Identitas Informan

Nama : Gusti Zainal Hakim

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jl. Sungai Jingah

2) Uraian Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan, Bapak Gusti Zainal Hakim sebagai salah satu anggota masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan senam massal yang diselenggarakan oleh Partai Golkar menjelang Pemilu 2024, diketahui bahwa kegiatan tersebut dihadiri oleh masyarakat dalam jumlah yang cukup besar dan berlangsung dengan suasana meriah. Menurutnya, konsep

⁶ Gusti Rina, "Wawancara Pribadi", di Kantor DPD Partai Golkar Kalsel, 3 Februari 2026

kegiatan yang dikemas secara santai dan menghibur menjadi salah satu faktor yang mampu menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan. Ia menjelaskan bahwa adanya pembagian *doorprize* turut menjadi daya tarik utama, sehingga banyak masyarakat terdorong untuk hadir dan berpartisipasi. Dalam hal ini, hadiah tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan partai.

Lebih lanjut, Bapak Gusti Zainal Hakim mengungkapkan bahwa di sela-sela kegiatan tersebut juga disampaikan pesan-pesan pendidikan politik kepada peserta. Materi yang diberikan umumnya berupa ajakan untuk menggunakan hak pilih, pentingnya berpartisipasi dalam pemilu, serta dorongan agar masyarakat tidak bersikap apatis terhadap proses demokrasi. Meskipun demikian, ia menilai bahwa penyampaian pendidikan politik masih tergolong singkat dan belum disampaikan secara mendalam. Menurut pengamatannya, sebagian peserta tampak lebih berfokus pada kegiatan senam dan pembagian *doorprize* dibandingkan pada pesan politik yang disampaikan, sehingga pemahaman yang diperoleh masyarakat belum sepenuhnya optimal.

Terkait efektivitasnya, ia berpendapat bahwa kegiatan tersebut cukup berhasil dalam menarik massa dan menciptakan suasana kebersamaan di tengah masyarakat. Namun, apabila diukur dari aspek peningkatan pemahaman politik, efektivitasnya dinilai masih perlu ditingkatkan. Ia mengaku bahwa kegiatan tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan dirinya untuk berpartisipasi dalam pemilu, mengingat sebelumnya ia telah memiliki kesadaran politik dan memang berniat menggunakan hak pilih. Akan tetapi, ia tidak

menampik bahwa kegiatan semacam ini berpotensi menjadi pengingat bagi masyarakat yang sebelumnya kurang peduli terhadap politik, sehingga secara tidak langsung dapat mendorong partisipasi mereka.

Sebagai bentuk evaluasi, Bapak Gusti Zainal Hakim menyarankan agar kegiatan pendidikan politik yang dikemas melalui aktivitas kemasyarakatan dapat disertai dengan sesi khusus yang membahas materi politik secara lebih jelas dan terarah, misalnya melalui dialog interaktif, penyampaian informasi yang lebih komprehensif, atau pembagian bahan edukatif kepada peserta. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya hadir untuk tujuan hiburan, tetapi juga memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya keterlibatan dalam kehidupan politik. Secara keseluruhan, ia menilai bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah positif karena mampu menghadirkan partai di tengah masyarakat serta membangun kedekatan dengan warga. Namun ke depan, penguatan substansi pendidikan politik dinilai perlu dilakukan agar manfaat kegiatan tidak hanya terlihat dari tingginya kehadiran peserta, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran dan pemahaman politik masyarakat.⁷

g. Informan 7

1) Identitas Informan

Nama : Hana Listiawati

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. HKSN

⁷ Gusti Zainal Hakim, "Wawancara Pribadi", di Halaman Kantor DPD Partai Golkar Kalsel, 2 Februari 2026

2) Uraian Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa Ibu Hana Listiawati merupakan salah satu masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan senam massal yang diselenggarakan oleh Partai Golkar pada tahun 2024 menjelang pemilu. Kegiatan tersebut dihadiri oleh banyak peserta dari berbagai lapisan masyarakat dan berlangsung dengan suasana yang meriah. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti manfaat olahraga bagi kesehatan, kesempatan untuk mempererat hubungan sosial, serta adanya *doorprize* yang disediakan oleh panitia. Keberadaan hadiah tersebut dinilai mampu meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan.

Ibu Hana menjelaskan bahwa selain sebagai kegiatan olahraga bersama, acara tersebut juga memuat unsur pendidikan politik. Panitia memberikan sosialisasi singkat terkait pentingnya menggunakan hak suara dalam pemilu, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, serta menyampaikan gambaran mengenai kriteria pemimpin yang baik. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bersifat hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi politik kepada masyarakat.

Menurutnya, metode penyampaian pendidikan politik melalui kegiatan nonformal seperti senam massal cukup efektif karena dikemas secara ringan dan tidak menimbulkan kesan menggurui. Pendekatan tersebut membuat masyarakat lebih terbuka dalam menerima informasi yang diberikan. Bahkan, beberapa peserta yang awalnya hadir karena tertarik pada aspek hiburan pada akhirnya tetap

memperoleh pengetahuan baru mengenai pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi.

Lebih lanjut, beliau mengakui bahwa kegiatan tersebut turut memperkuat kesadaran politiknya. Sosialisasi yang diberikan menjadi pengingat bahwa setiap suara memiliki arti penting dalam menentukan kepemimpinan daerah maupun nasional. Hal ini mendorong dirinya untuk datang ke tempat pemungutan suara serta mengajak anggota keluarga agar tidak melewatkan kesempatan untuk memilih. Ia juga mengamati adanya peningkatan perhatian peserta terhadap isu pemilu, yang terlihat dari percakapan antar warga setelah kegiatan berakhir, termasuk saling mengingatkan mengenai jadwal pemungutan suara.

Secara keseluruhan, Ibu Hana menilai bahwa pendidikan politik yang disampaikan melalui kegiatan kemasyarakatan memiliki keunggulan dalam menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas. Tidak semua individu memiliki ketertarikan untuk mengikuti forum diskusi politik formal, sehingga pendekatan melalui kegiatan olahraga atau hiburan dapat menjadi alternatif yang efektif. Meskipun *doorprize* berperan sebagai stimulus awal kehadiran peserta, substansi pendidikan politik tetap memberikan manfaat tambahan. Ia menyarankan agar kegiatan serupa dilaksanakan secara berkesinambungan dan tidak terbatas pada periode menjelang pemilu saja, serta disertai dengan sesi komunikasi yang lebih interaktif agar pemahaman masyarakat mengenai partisipasi politik dapat semakin berkembang.⁸

⁸ Hana Listiawati, "Wawancara Pribadi", di Halaman Kantor DPD Partai Golkar Kalsel, 2 Februari 2026

2. Matrik

Tabel 4. 1 Tabel Matrik

No.	Informan	Bentuk Pendidikan Politik yang Dilaksanakan	Efektivitas dalam Meningkatkan Partisipasi Politik
1.	Dewi Damayanti Said (Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan DPD Partai Golkar Kalsel)	Pendidikan politik dilaksanakan dalam bentuk kegiatan internal dan eksternal. Secara internal melalui kaderisasi partai yang berfokus pada penguatan ideologi, pemahaman sistem politik, serta peningkatan kapasitas kader. Secara eksternal melalui sosialisasi peraturan daerah, sosialisasi wawasan kebangsaan, seminar dan diskusi publik di sekolah serta perguruan tinggi, serta forum tatap muka dengan masyarakat dan	Pendidikan politik dinilai efektif, terutama menjelang Pemilu 2024. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya antusiasme peserta, keaktifan dalam diskusi, serta meningkatnya pemahaman politik masyarakat. Kegiatan yang dilakukan secara rutin (dua kali sebulan) membantu memperluas jangkauan edukasi politik. Namun, efektivitas masih menghadapi kendala berupa stigma negatif terhadap politik dan

		<p>organisasi kemasyarakatan. Kegiatan dilakukan secara partisipatif melalui penyampaian materi, dialog interaktif, dan sesi tanya jawab. Sasaran utama meliputi siswa SMA, mahasiswa (pemilih pemula), serta masyarakat umum.</p>	<p>politisi yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Meskipun demikian, melalui pendekatan edukatif, kegiatan ini mampu mendorong kesadaran, pemahaman hak dan kewajiban warga negara, serta partisipasi politik yang lebih aktif dan bertanggung jawab.</p>
2.	<p>Puar Junaidi (Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kalsel)</p>	<p>Pendidikan politik dilaksanakan melalui dua sasaran utama, yaitu kader dan masyarakat. Kepada kader dilakukan melalui pembekalan terkait rambu-rambu organisasi, kewenangan, serta hak dan kewajiban dalam partai. Sementara kepada masyarakat</p>	<p>Pendidikan politik dinilai relatif efektif dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Indikator efektivitas salah satunya dilihat dari perolehan suara partai dalam Pemilu 2024 yang menunjukkan adanya peningkatan dukungan masyarakat. Selain itu,</p>

		<p>dilakukan melalui peran fraksi di lembaga legislatif sebagai perpanjangan tangan partai, seperti kegiatan penyerapan aspirasi, kunjungan kerja ke daerah pemilihan, forum reses, dialog publik, serta pertemuan langsung dengan masyarakat. Selain itu, pendidikan politik juga diwujudkan melalui seminar mahasiswa, diskusi publik, serta sosialisasi peraturan perundang-undangan dan regulasi terbaru. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terbuka, edukatif, dan berkelanjutan dengan menekankan transparansi</p>	<p>kegiatan pendidikan politik yang dilakukan secara berkelanjutan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi partai, proses kebijakan, serta peran wakil rakyat. Namun, efektivitas masih menghadapi kendala berupa rendahnya kepercayaan masyarakat akibat persepsi bahwa partai politik sering tidak merealisasikan janji. Oleh karena itu, konsistensi antara program dan realisasi menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan publik. Secara keseluruhan, pendidikan politik berkontribusi dalam</p>
--	--	--	--

		serta penyampaian fungsi dan peran partai politik kepada masyarakat.	mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi, baik dari sisi pemahaman maupun partisipasi aktif.
3.	Amran (Wakil Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini DPD Partai Golkar Kalsel)	Penyebarluasan informasi dan edukasi politik melalui media cetak, elektronik, dan media sosial	Memperluas akses masyarakat terhadap informasi politik serta membentuk opini publik yang lebih responsif terhadap program dan kegiatan partai.
4.	Ari Bimo GP (Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga DPD Partai Golkar Kalsel)	Pendidikan politik dilaksanakan melalui konsolidasi organisasi dengan turun langsung ke lapangan untuk memberikan pemahaman kepada pengurus dan kader mengenai visi, misi, dan tujuan partai. Selain itu, kegiatan ini melibatkan organisasi	Pendidikan politik dinilai berjalan efektif karena didukung oleh struktur organisasi partai yang kuat dan pelaksanaan yang berkelanjutan. Kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman kader serta mendorong keterlibatan generasi muda dalam

		<p>sayap partai seperti AMPG dan KPPG dalam kaderisasi generasi muda dan pemberdayaan perempuan. Pendidikan politik juga diwujudkan melalui program edukatif yang memuat materi tentang peran partai politik, hak dan kewajiban warga negara, serta pemahaman terkait peraturan pemilihan.</p>	<p>politik. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada optimalisasi pelaksanaan program dan kemampuan partai dalam menghadirkan pendekatan yang menarik dan relevan, khususnya bagi pemilih pemula.</p>
5.	Gusti Rina (Wiraswasta)	<p>Pelatihan peningkatan kapasitas perempuan (<i>training of trainers</i>) serta pendekatan langsung kepada masyarakat (<i>door to door</i>)</p>	<p>Meningkatkan kesiapan, kepercayaan diri, dan kemampuan komunikasi kader perempuan dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu.</p>
6.	Gusti Zainal Hakim (Pedagang)	<p>Kegiatan kemasyarakatan berupa senam bersama yang dipadukan dengan</p>	<p>Efektif dalam menarik kehadiran masyarakat dan membangun</p>

		penyampaian pesan pendidikan politik	kedekatan sosial, namun substansi pendidikan politik yang disampaikan masih perlu diperdalam agar pemahaman peserta lebih optimal.
7.	Hana Listiawati (Ibu Rumah Tangga)	Kegiatan senam bersama yang disertai sosialisasi pentingnya penggunaan hak pilih	Memberikan dorongan terhadap kesadaran penggunaan hak pilih serta memotivasi partisipasi keluarga dan lingkungan sekitar dalam pemilu.

C. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Bentuk Pendidikan Politik yang Dilakukan Partai Golongan Karya (Golkar) di Kota Banjarmasin dalam Menghadapi Pemilu 2024

Bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu 2024 memperlihatkan keterkaitan yang erat dengan konsep partai politik dan pendidikan politik dalam kajian ilmu

politik. Partai politik secara konseptual dipahami sebagai organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan dan menyalurkan kepentingan politik anggota serta masyarakat melalui mekanisme demokrasi yang sah. Keberadaan partai politik dalam sistem demokrasi tidak hanya berfungsi sebagai peserta pemilu atau alat untuk memperoleh kekuasaan, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab dalam membina dan membentuk kesadaran politik warga negara.

Dalam teori politik, partai politik memiliki beberapa fungsi utama, antara lain sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, serta pengatur konflik. Salah satu fungsi yang sangat penting adalah fungsi sosialisasi atau pendidikan politik. Melalui fungsi ini, partai politik berperan dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, memberikan pemahaman mengenai sistem politik, serta membentuk orientasi dan sikap politik masyarakat. Pendidikan politik menjadi sarana untuk mentransmisikan ideologi partai, program kerja, serta visi kebijakan kepada masyarakat agar tercipta kesamaan pemahaman dan arah perjuangan politik.

Pendidikan politik bukan sekadar aktivitas pelengkap yang dilakukan pada saat menjelang pemilu, melainkan merupakan bagian integral dari peran partai dalam membangun sistem demokrasi yang partisipatif. Demokrasi yang berkualitas mensyaratkan adanya warga negara yang sadar politik, memahami hak dan kewajibannya, serta mampu berpartisipasi secara rasional dalam proses pengambilan keputusan politik.

Tanpa adanya pendidikan politik yang memadai, partisipasi masyarakat berpotensi bersifat pragmatis dan tidak didasarkan pada pertimbangan yang matang.

Dalam konteks ini, bentuk-bentuk pendidikan politik yang dilakukan menunjukkan bagaimana partai berupaya menjalankan fungsinya sebagai agen pembelajaran politik bagi masyarakat. Kegiatan seperti kaderisasi internal, seminar, sosialisasi kepemiluan, dialog interaktif, hingga pendekatan sosial kemasyarakatan dapat dipahami sebagai bagian dari proses pembinaan kesadaran politik. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat tidak hanya diperkenalkan pada aspek teknis pemilu, tetapi juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya keterlibatan dalam kehidupan demokrasi.

Pemahaman tersebut sejalan dengan pandangan Miriam Budiardjo yang menyatakan bahwa partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok tersebut adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan menduduki jabatan politik guna melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan, baik melalui cara-cara konstitusional maupun, dalam konteks tertentu, inkonstitusional. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa partai politik tidak hanya berfungsi sebagai organisasi elektoral, tetapi juga sebagai wadah pembinaan dan penguatan orientasi politik anggotanya. Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa orientasi, nilai, dan

cita-cita yang dianut partai dapat dipahami, diinternalisasikan, dan diperjuangkan secara sistematis oleh kader maupun oleh masyarakat pendukungnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, pendidikan politik bukan hanya kewajiban normatif partai politik, tetapi juga merupakan tanggung jawab konstitusional dalam mendukung sistem demokrasi.

Kegiatan kaderisasi dan internalisasi nilai-nilai ideologi yang dilakukan menunjukkan praktik pendidikan politik sebagaimana dipahami oleh Kartini Kartono, bahwa pendidikan politik merupakan proses penyiapan kader untuk menghadapi perjuangan politik dan memperoleh penyelesaian politik. Pendidikan politik dalam pengertian ini tidak hanya menyampaikan pengetahuan mengenai sistem politik, tetapi juga membentuk orientasi, sikap, dan komitmen politik. Proses pembinaan kader, konsolidasi organisasi, serta pelibatan organisasi sayap seperti AMPG dan KPPG mencerminkan pendidikan politik yang bersifat sistematis dan berkelanjutan. Hal ini juga selaras dengan pengertian pendidikan politik sebagai proses pembelajaran mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kaderisasi tidak hanya berfungsi untuk

kepentingan elektoral, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter politik dan regenerasi kepemimpinan dalam tubuh partai.

Sosialisasi dan edukasi publik kepada masyarakat menunjukkan dimensi pendidikan politik yang lebih luas, yaitu pendidikan politik eksternal. Pendidikan politik dalam konteks ini berorientasi pada peningkatan kesadaran politik masyarakat atau *political awareness*. Miriam Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, baik melalui pemberian suara, menghadiri rapat umum, maupun menjalin hubungan dengan pejabat pemerintah. Sementara itu, Michael Rush dan Philip Althoff menyatakan bahwa partisipasi politik mencakup kegiatan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum. Seminar, penyuluhan, serta kegiatan *reses* yang dilakukan mencerminkan bentuk partisipasi tersebut karena menyediakan ruang interaksi politik antara masyarakat dan wakil rakyat. Melalui forum dialog dan diskusi, masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memiliki kesempatan menyampaikan aspirasi, yang pada akhirnya memperkuat fungsi partai sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah.

Pemanfaatan media dan penggalangan opini juga memiliki keterkaitan dengan fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik dan penyederhana pilihan politik. Dalam teori partai politik, partai berperan membantu masyarakat memahami pilihan-pilihan politik yang

tersedia serta membangun opini publik melalui penyampaian program dan gagasan. Penggunaan media cetak, elektronik, dan media sosial menunjukkan adanya adaptasi terhadap perkembangan komunikasi modern, sehingga pendidikan politik dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Meskipun sifatnya lebih informatif dibandingkan dialogis, penyebaran informasi melalui media tetap berperan dalam membentuk pemahaman masyarakat mengenai aktivitas politik dan pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi.

Pendekatan sosial kemasyarakatan seperti kegiatan senam bersama yang disertai penyampaian pesan politik dapat dipahami sebagai bagian dari pendidikan politik dalam bentuk tidak langsung. Meskipun secara bentuk kegiatan ini menyerupai kampanye, dalam pelaksanaannya tetap mengandung unsur edukatif melalui penyampaian informasi dan penguatan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban politik. Pendidikan politik pada dasarnya tidak selalu berlangsung dalam forum formal, tetapi juga dapat dilakukan melalui interaksi sosial yang lebih santai dan mudah diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini, kegiatan tersebut menjadi media komunikasi yang menjembatani hubungan antara partai dan masyarakat, sehingga pesan-pesan politik dapat tersampaikan secara persuasif. Dengan demikian, walaupun materi yang disampaikan tidak bersifat mendalam, kegiatan ini tetap berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat serta

mendorong partisipasi dalam pemilu sebagai bagian dari tujuan pendidikan politik.

Secara keseluruhan, bentuk-bentuk pendidikan politik yang dilakukan menunjukkan pelaksanaan fungsi partai politik dalam membangun kesadaran, membentuk orientasi politik, serta mendorong keterlibatan warga negara dalam kehidupan demokrasi. Pendidikan politik dalam praktik tersebut mencerminkan pemahaman bahwa demokrasi tidak hanya bergantung pada prosedur pemilu, tetapi juga pada kualitas kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, kegiatan kaderisasi, sosialisasi publik, pemanfaatan media, dan pendekatan sosial-kemasyarakatan merupakan manifestasi konkret dari peran partai politik dalam membina budaya politik yang partisipatif dan bertanggung jawab.

2. Efektivitas Pendidikan Politik Partai Golkar dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Kota Banjarmasin pada Pemilu 2024

Efektivitas pendidikan politik dalam penelitian ini dianalisis dengan melihat sejauh mana kegiatan yang dilakukan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu 2024. Secara konseptual, efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Sondang P. Siagian menjelaskan bahwa efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan, sedangkan Mahmudi menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara hasil yang

dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks pendidikan politik, tujuan tersebut tidak hanya bersifat kuantitatif, melainkan juga kualitatif, seperti meningkatnya kesadaran politik, bertambahnya pemahaman masyarakat mengenai proses pemilu, tumbuhnya keterlibatan dalam kegiatan politik, serta menguatnya hubungan antara partai dan masyarakat.

Salah satu indikator efektivitas pendidikan politik adalah peningkatan kesadaran dan pemahaman politik masyarakat. Pendidikan politik pada dasarnya bertujuan membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan demokrasi. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menegaskan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, efektivitas pendidikan politik tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari sejauh mana kegiatan tersebut mampu menghasilkan perubahan pemahaman dan sikap politik masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan informan, kegiatan pendidikan politik yang dilakukan berupa seminar, sosialisasi kepemiluan, dialog interaktif, serta pendekatan langsung kepada masyarakat menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mengenai tahapan Pemilu 2024 dan pentingnya penggunaan hak pilih. Perubahan terlihat pada masyarakat

yang mengikuti kegiatan tersebut menunjukkan sikap yang lebih responsif terhadap informasi politik serta lebih terbuka untuk berdiskusi mengenai kebijakan publik dan proses demokrasi. Dalam perspektif teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo, partisipasi politik mensyaratkan adanya kesadaran dan minat terhadap kehidupan politik. Tanpa kesadaran politik, partisipasi cenderung bersifat pasif atau bahkan tidak terjadi. Oleh karena itu, meningkatnya kesadaran dan pemahaman politik masyarakat dapat dipandang sebagai indikator awal efektivitas pendidikan politik.

Selain peningkatan kesadaran, efektivitas pendidikan politik juga tercermin dari meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan politik. Michael Rush dan Philip Althoff menjelaskan bahwa partisipasi politik mencakup aktivitas warga negara yang bertujuan mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, kegiatan yang dilaksanakan, seperti seminar politik, pelatihan kader perempuan, kegiatan organisasi sayap partai, serta aktivitas sosial yang disertai pesan-pesan politik, memberikan ruang partisipatif bagi masyarakat. Informan menyampaikan bahwa masyarakat tidak hanya hadir sebagai peserta pasif, tetapi juga aktif dalam diskusi dan penyampaian aspirasi. Hal tersebut menunjukkan adanya transformasi dari sikap apatis menuju keterlibatan aktif dalam ruang-ruang politik. Keterlibatan semacam ini mencerminkan

bentuk partisipasi politik konvensional yang menunjukkan adanya minat dan kepedulian terhadap proses demokrasi.

Efektivitas pendidikan politik juga dapat dianalisis melalui penguatan hubungan antara partai dan masyarakat. Dalam teori fungsi partai politik, partai berperan sebagai sarana komunikasi dan representasi politik yang menghubungkan kepentingan masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan. Melalui kegiatan *reses*, kunjungan lapangan, serta dialog bersama tokoh masyarakat, tercipta komunikasi dua arah yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan memperoleh penjelasan secara langsung dari wakil partai. Interaksi yang bersifat dialogis ini berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap partai, karena mereka merasa didengar dan diperhatikan. Hubungan yang terbangun tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga membangun kedekatan emosional yang dapat mendorong partisipasi politik yang lebih aktif.

Dampak yang lebih konkret dari efektivitas pendidikan politik dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024. Partisipasi politik dalam konteks pemilu terutama tercermin dari penggunaan hak pilih dan keterlibatan aktif dalam proses demokrasi. Data menunjukkan adanya peningkatan perolehan suara Partai Golkar di Kota Banjarmasin, dari 38.095 suara pada Pemilu 2019 menjadi 53.973 suara pada Pemilu

2024.⁹ Peningkatan ini memperlihatkan tren dukungan yang positif. Meskipun demikian, peningkatan perolehan suara tersebut tidak dapat sepenuhnya dikaitkan sebagai hasil tunggal dari pendidikan politik yang dilakukan, karena dipengaruhi pula oleh faktor lain seperti dinamika politik lokal, figur calon, serta kondisi sosial masyarakat. Namun demikian, dalam kerangka analisis penelitian ini, peningkatan tersebut dapat dipandang sebagai indikator pendukung bahwa pendidikan politik berjalan seiring dengan meningkatnya partisipasi dan dukungan masyarakat.

Secara keseluruhan, pendidikan politik yang dilakukan menunjukkan adanya capaian dalam meningkatkan kesadaran politik, memperluas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik, memperkuat hubungan antara partai dan masyarakat, serta mendorong partisipasi dalam Pemilu 2024. Meskipun efektivitas tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan belum sepenuhnya merata di seluruh lapisan masyarakat, kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan telah menunjukkan peran penting dalam mendorong partisipasi politik masyarakat Kota Banjarmasin dalam konteks demokrasi elektoral., yang pada akhirnya dapat berdampak pada partisipasi dalam pemilu.

⁹ Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 270 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Banjarmasin Tahun 2024, diakses pada tanggal 5 April 2026 https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/banjarmasin/data_kepkpud/2024kpt270.pdf